



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
PASCAPANEN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762  
WEBSITE: pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.pascapanen@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
PASCAPANEN PERTANIAN**

**NOMOR : 65/KPTS/HM.130/H.10/01/2025**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. Bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Unit Kerja Eselon II;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M.06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis, Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN SELAKU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon II hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Kepala Balai Besar,



Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc  
NIP 197102241998031002

Lampiran : Surat Penyampaian DIP dan usulan DIK  
 Nomor : 65/KPTS/HM.130/H.10/01/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025  
 Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A	Kepegawaian				
1	Daftar riwayat hidup, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> Kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, Biodata elektronik PNS ( <i>database</i> ), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 UU KIP Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Menjaga rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2	Daftar Penilaian SKP data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 UU KIP Huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya	Mempermudah proses penyusunan kebijakan	Terbuka setelah dilantik

			pengungkapan prematur		
<b>B</b>	<b>Tata Usaha</b>				
1	Surat-surat/ memo/ memorandum/ nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	Pasal 17 UU KIP Huruf i	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	Mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai
<b>C</b>	<b>Kerja Sama</b>				
1	MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dan/ atau Dalam Negeri dalam bidang Pascapanen Pertanian	Pasal 17 UU KIP Huruf f	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Kerjasama lebih baik	Sampai berakhirnya kerja sama dan/ atau izin dari para pihak
<b>D</b>	<b>HaKI</b>				
1	Inovasi hasil litbang yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	Pasal 17 UU KIP Huruf b	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	HAKI Terlindungi	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang/ Jasa</b>				
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 UU KIP Huruf I dan j	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature - Menimbulkan	Persaingan sehat pada saat lelang	Tidak Terbatas

			persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa		
2	Dokumen Kontrak	Pasal 17 UU KIP Huruf I dan j	Muncul persaingan yang tidak sehat	Persaingan sehat	Tidak Terbatas
<b>F</b>	<b>Keuangan</b>				
1	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM dan SPPD)	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	Rahasia pribadi terlindungi	20 Tahun
2	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	Penyalahgunaan pihak lain	Terhindar dari penyalahgunaan pihak lain	Tidak Terbatas
3	Hasil pemeriksaan kasus	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Proses penyusunan kebijakan tidak ada kendala	Tidak Terbatas
4	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Pasal 17 UU KIP Huruf h	- Dapat mengungkapkannya rahasia pribadi pejabat/ pegawai dan untuk menghindari kejahatan - Dapat mengungkapkannya	Rahasia pribadi terlindungi	Pegawai/ Pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

			n data rahasia yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga		
5	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan pihak lain</li> <li>- Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi</li> </ul>	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
6	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pengawasan Melalui Audit: kinerja, <i>review</i> meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan internal pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur</li> <li>- Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara</li> </ul>	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
7	Laporan Tindak Lanjut	Pasal 17 UU KIP	-	Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

	Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Huruf adan i	Penyalahgunaa n oleh pihak lain - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara - Dapat mengungkap surat- surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	n pihak lain dapat dihindari	
<b>G</b>	<b>Lain-lain</b>				
1	Akses Ruang Server	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
2	<i>Internet Protocol (IP) Address</i>	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penerobosan/ penyalahguna an akses	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
3	<i>Sistem Management Database</i>	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
4	Kode Akses Elektronik	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penyalahgunaan	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas

			oleh pihak lain	n pihak lain dapat dihindari	
5	Data penelitian yang belum dipublikasikan (Metode, dll)	Pasal 17 UU KIP Huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
6	Identitas Pelanggan Data serta informasi selama kegiatan pengujian laboratorium Identitas pihak yang memberikan informasi tentang klien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional</li> <li>2. Klausul 4.2 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan</li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan
7	Seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional</li> <li>2. Klausul 4.5 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan</li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan
8	Identitas peserta/pelanggan serta informasi yang diperoleh dan dibuat selama pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional</li> <li>4. Klausul 4.2</li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan

		ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan			
--	--	---	--	--	--

PPID Pelaksana UPT  
Kepala Balai Besar,



Dr. Asmarhansyah,SP., M.Sc  
NIP 197102241998031002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian  
 Nomor : 65/KPTS/HM.130/H.10/01/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025  
 Tentang : Daftar Informasi Publik

	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN	Nomor :
		Tanggal Efektif : 02 Jan 2019
	DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	Tanggal Revisi : Januari 2025
		Revisi Ke : 7
		Halaman : 8

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK		RETENSI	KLASIFIKASI DOKUMEN
					HARD COPY	SOFT COPY		
A	Profil							
1	Alamat	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
2	Sejarah BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selamanya	BK
3	Profil BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
4	Rencana Strategis	BBPSI Pascapanen	Kelompok. PE	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
5	Rencana Kinerja Tahunan	BBPSI Pascapanen	Kelompok. PE	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
6	Struktur Organisasi	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag. TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
7	Data SDM	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
8	Profil Unit Kerja	BBPSI	Ka.Bag. TU	Bogor, 2025	√	√	Selama	BK

		Pascapanen					Masih Berlaku	
9	Daftar Alamat	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√		Selama Masih Berlaku	SS
<b>B</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>							
1	DIPA	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
2	RKA-KL (Rencana Kerja) / POK	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
3	Perjanjian Kerja	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
4	SOP	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
5	Juklak/ Juknis	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag. TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
<b>C</b>	<b>Kinerja</b>							
1	LAKIN	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
2	Laporan Tahunan	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
3	Laporan Bulanan	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√		1 Bulan	BK
<b>D</b>	<b>Keuangan</b>							
1	Laporan Keuangan	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag. TU	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
<b>E</b>	<b>Laporan Akses Informasi Publik</b>							
1	Data Pemohon Informasi Publik (Register)	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI, PPID	Bogor, 2025	√	√	Selamanya	BK
2	Laporan PPID	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI,	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK

			PPID					
3	Laporan Pengaduan Masyarakat	BBPSI Pascapanen	Tim DUMAS	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
F	Peraturan							
1	SK Nomor: 125/KPTS/HM.120/H.10/09/2023 tentang Standar Pelayanan Publik BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
2	SK Nomor: /KPTS/OT.050/H.10/02/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU,	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
3	SK Nomor: /KPTS/HM.130/H.10/02/2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag Tu	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
5	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup BSIP	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
6	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 279/Kpts/OT.050/H.10/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK

	Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis, Kementerian Pertanian							
G	Informasi Tentang							
1	SOP Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Gedung	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
2	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
3	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	BBPSI Pascapanen	Tim DUMAS	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
4	SOP/IK Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Mekanik dan Elektronik	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
5	Daftar Lelang	BBPSI Pascapanen	PPK	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
6	SOP layanan laboratorium pengujian	BBPSI Pascapanen	Penjab admin layanan standar	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	BK
7	SOP layanan PUP	BBPSI Pascapanen	Penjab admin layanan standar	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
8	SOP layanan LSPro	BBPSI Pascapanen	Penjab admin layanan standa	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
9	SOP layanan LPH	BBPSI Pascapanen	Penjab admin layanan standar	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
10	Hak dan kewajiban pelanggan untuk masing-masing layanan (Lab, PUP, Lspro, LPH)	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
11	Legalitas lembaga dan struktur organisasi /LPK	BBPSI Pascapanen	Penjab sistem mutu	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
12	Pernyataan non diskriminatif	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK

13	Tanggung gugat keuangan LPK	BBPSI Pascapanen	Kabag TU	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
14	Direktori sertifikasi	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
15	SOP keluhan dan banding	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√	√	5 Tahun	BK
H	Informasi Tentang Organisasi							
1	Pedoman Umum BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√		Selama Masih Berlaku	BK
2	SOP Kegiatan BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
3	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bagian Tata Usaha	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
4	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Kepegawaian	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja. Kepegawaian	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
5	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Keuangan dan BMN	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja Keuangan	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
6	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja RT dan Ketatausahaan	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja RT dan Perlengkapan	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
7	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Program dan Evaluasi	BBPSI Pascapanen	Kelompok PE	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
8	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Program	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja Program	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
9	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja Evaluasi	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK

	Evaluasi							
10	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Layanan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
11	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
12	Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar	BBPSI Pascapanen	Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
13	Standar Pelayanan Publik BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√		1 Tahun	BK
I	Agenda Kerja Pimpinan							
1	Rumusan Hasil Rapat Kinerja	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag. TU	Bogor, 2025	√		1 Tahun	SS
2	Laporan Hasil Kunjungan (Perjalanan Dinas)	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag. TU	Bogor, 2025	√		1 Tahun	SS
J	Statistik							
1	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	BK
K	Informasi Serta Merta							
1	Pemberitahuan Operasional Layanan BSIP Pascapanen	BBPSI Pascapanen	Kelompok KLSI	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	SM
2	Bencana Alam	BBPSI Pascapanen	Ka.Bag TU	Bogor, 2025	√	√	Selama Masih Berlaku	SM

Keterangan:

- BK : Berkala
- SS : Setiap Saat
- SM : Serta Merta
- DK : Dikecualikan

PPID Pelaksana UPT  
Kepala Balai Besar,



Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc  
NIP 197102241998031002